

# Analisis Manajerial terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Ekologis dan Ekonomis Ekosistem Lamun

Esti Rahma Cahyani<sup>1</sup> dan Sasanti Sihsubekti<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Malang, Indonesia;

<sup>1</sup>Email : [estirahmacahyani2023@gmail.com](mailto:estirahmacahyani2023@gmail.com)

<sup>2</sup>Email : [sasanti03@gmail.com](mailto:sasanti03@gmail.com)

IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science

Vol 5 No 2 November 2024

<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i2.127>

Received: Agust 20, 2024

Accepted: September 25, 2024

Published: November 11, 2024

**Publisher's Note:** Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract :** Seagrass ecosystems play a crucial role in supporting coastal ecology. Lamongan Regency, East Java, contains extensive seagrass beds along its coastline, with varying conditions from healthy to degraded. This study aims to analyze community perceptions of the ecological and economic benefits of seagrass ecosystems in the coastal areas of Lamongan. Conducted between November and December 2024, the research utilizes descriptive qualitative analysis. Findings indicate that the local community's perception of seagrass ecosystems is largely positive, with a good understanding of both the ecological functions and economic potential of seagrass beds. Furthermore, the community demonstrates a high level of awareness and active participation in conservation efforts. This study provides insights for developing community-based conservation strategies that integrate seagrass ecosystems into broader coastal management practices.

**Keywords:** *Seagrass Ecosystems, Ecological Benefits, Economic Benefits*

## Pendahuluan

Sumber daya alam merupakan fondasi utama dalam menopang keberlangsungan kehidupan manusia karena menyediakan berbagai kebutuhan dasar, mulai dari pangan, energi, hingga jasa ekosistem yang mendukung sistem sosial, ekonomi, dan ekologis. Dalam perspektif

manajerial, sumber daya alam tidak hanya dilihat sebagai objek pemanfaatan, tetapi sebagai sistem yang memerlukan pengelolaan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan lintas generasi. Sumber daya alam meliputi semua komponen lingkungan, baik biotik maupun abiotik, yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (Utami et al., 2023). Namun demikian, praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan partisipasi sosial telah menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan. Tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lahan, pencemaran perairan, dan penurunan keanekaragaman hayati menuntut pendekatan manajerial baru yang berbasis pada ekosistem dan melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup> wilayah laut (Lasabuda, 2013), menyimpan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Salah satu ekosistem yang kerap terabaikan dalam agenda konservasi nasional adalah padang lamun (seagrass beds), padahal ekosistem ini memegang peran strategis dalam menyediakan jasa ekosistem penting seperti habitat ikan, perlindungan pantai, dan penyimpanan karbon biru. Lamun merupakan tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup sepenuhnya terendam di perairan laut dangkal (Den Hartog, 1970). Berbeda dengan alga, lamun memiliki struktur vegetatif lengkap seperti akar, batang, dan daun sejati, serta berkembang biak secara generatif. Ekosistem lamun menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut bernilai ekonomi tinggi dan berkontribusi besar terhadap produktivitas perikanan.

Dalam konteks manajemen sumber daya pesisir, padang lamun memiliki peran ganda: sebagai sistem ekologis yang menyokong kehidupan laut, dan sebagai sumber nilai ekonomis bagi masyarakat pesisir. Penelitian oleh Cullen menegaskan

bahwa lamun memainkan peran vital dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir (Cullen-Unsworth et al., 2014). Namun demikian, Waycott menunjukkan bahwa lamun adalah salah satu ekosistem yang mengalami penurunan paling cepat di dunia, dengan laju kehilangan hingga 7% per tahun akibat tekanan antropogenik seperti reklamasi, pencemaran, dan overfishing (Waycott et al., 2009). Di Indonesia, sebagian besar wilayah pesisir yang memiliki potensi lamun belum memiliki kerangka manajerial yang kuat dan komprehensif dalam hal konservasi.

Pesisir Lamongan di Jawa Timur merupakan contoh konkret dari kawasan pesisir yang mengalami tekanan terhadap ekosistem lamunnya. Wilayah ini berbatasan langsung dengan kawasan industri Gresik dan merupakan jalur pelayaran aktif. Berbagai aktivitas seperti pembuangan limbah rumah tangga, budidaya perikanan, perbaikan kapal, serta keberadaan pelabuhan kecil dan aliran limbah dari daratan telah menyebabkan degradasi ekosistem lamun secara signifikan. Selain itu, arus laut musiman yang membawa limbah industri dari wilayah barat memperparah kondisi perairan Lamongan. Beberapa jenis lamun yang masih dapat ditemukan di perairan Lamongan antara lain *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, dan *Halodule uninervis* (Julianinda et al., 2022). Meskipun secara ekologis kawasan ini memiliki nilai penting, secara manajerial belum ada model pengelolaan yang terpadu dan berbasis pada persepsi serta partisipasi masyarakat lokal.

Di sinilah urgensi analisis manajerial menjadi penting. Salah satu tantangan dalam pengelolaan ekosistem lamun adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai ekologis dan ekonomis yang dimiliki oleh lamun. Studi oleh Ruiz menunjukkan bahwa kesenjangan persepsi antara pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap jasa ekosistem lamun menjadi penghambat utama dalam

keberhasilan konservasi (Ruiz-Frau et al., 2013). Padahal, persepsi masyarakat memainkan peran strategis dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks kebijakan berbasis komunitas (*community-based management*). Penelitian oleh Fanning di Qatar menyimpulkan bahwa pengelolaan pesisir yang mengintegrasikan persepsi masyarakat lokal lebih efektif dalam mendorong konservasi jangka Panjang (Fanning et al., 2021).

Kondisi di Lamongan memperlihatkan ketidaksesuaian antara potensi ekologis lamun dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem tersebut. Keberhasilan konservasi lamun sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memahami dan merespons kondisi ekosistem di sekitar mereka. Oleh karena itu, analisis manajerial terhadap persepsi masyarakat sangat penting untuk merancang strategi pengelolaan yang berbasis realitas sosial dan ekologis. Studi-studi terdahulu (Lukman et al., 2021; Rifai et al., 2023) telah mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat lamun dapat memperkuat komitmen terhadap konservasi, khususnya ketika diintegrasikan dalam kerangka manajemen berbasis ekosistem dan pendekatan partisipatif.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana masyarakat pesisir Lamongan memaknai dan memahami manfaat ekologis dan ekonomis dari padang lamun, serta mengevaluasi implikasinya terhadap strategi manajemen lingkungan pesisir. Fokus analisis mencakup dimensi persepsi, sikap, serta potensi partisipasi masyarakat dalam konservasi lamun. Dengan pendekatan manajerial, studi ini tidak hanya menjelaskan bagaimana masyarakat menilai lamun, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat digunakan untuk mendesain model pengelolaan sumber daya pesisir yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (Assyakurrohim et al., 2022). Metode ini dipilih

untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konstruksi sosial yang dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan lokal, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat pesisir. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan. Informan penelitian terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat, pengelola wilayah pesisir, serta pemangku kepentingan lokal yang memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas pesisir. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan *grounded theory* untuk mengungkap pola-pola makna sosial yang berkaitan dengan ekosistem lamun dan konservasinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam kerangka manajemen sumber daya alam, khususnya ekosistem pesisir yang berbasis lamun. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lamun yang partisipatif dan adaptif. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai integrasi pendekatan sosial-ekologis dalam konservasi ekosistem laut. Penelitian (Mendoza-Gonzalez et al., 2021; Mtwana Nordlund et al., 2016) mendukung bahwa pemahaman terhadap persepsi masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap desain kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan inklusif. Melalui analisis manajerial, studi ini akan memberikan panduan praktis dalam pengambilan keputusan berbasis data sosial dan lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem lamun di wilayah pesisir Lamongan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus untuk menggali persepsi masyarakat pesisir terhadap manfaat ekologis dan ekonomis ekosistem lamun di pesisir Lamongan, Jawa Timur.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara kontekstual dinamika sosial, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi hubungan masyarakat dengan lamun. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena memiliki ekosistem lamun yang masih aktif namun mengalami tekanan ekologis. Penelitian dilakukan selama bulan November hingga Desember 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi partisipatif. Fokus wawancara adalah eksplorasi pemahaman masyarakat terkait fungsi lamun sebagai habitat biota laut, penyerap karbon, pelindung pantai, dan penyokong kehidupan ekonomi pesisir.

Informan ditentukan menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu pemilihan secara kebetulan terhadap individu yang memenuhi kriteria di lokasi penelitian. Kriteria informan meliputi usia minimal 17 tahun, tinggal di wilayah pesisir, serta memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai ekosistem laut. Sebanyak 32 informan diwawancarai, terdiri dari nelayan, pelaku usaha perikanan, dan tokoh lokal. Jumlah tersebut dipandang mencukupi berdasarkan prinsip saturasi data—yakni ketika informasi yang diperoleh mulai menunjukkan pola yang berulang (Asrulla et al., 2023). Validitas data diuji melalui triangulasi teknik dan sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan observasi lapangan dan dokumentasi (Sugiono, 2016). Peneliti juga mencatat situasi lingkungan, aktivitas ekonomi masyarakat, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan lamun untuk memperkaya pemahaman terhadap konteks lokal.

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik induktif, dengan tahapan transkripsi, reduksi, pengkodean, dan kategorisasi temuan ke dalam tema-tema utama. Analisis dilakukan dengan prinsip *grounded theory*, yaitu membangun pemahaman teoretis dari bawah berdasarkan data lapangan (Karuntu et al., 2022). Fokus interpretasi diarahkan pada bagaimana masyarakat memaknai ekosistem

lamun dan bagaimana persepsi itu memengaruhi keterlibatan mereka dalam konservasi. Persepsi ini kemudian diposisikan dalam kerangka manajerial yang menilai potensi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir berbasis komunitas (Ulum & Anggainsi, 2020). Diharapkan, hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik sosial-ekologis wilayah pesisir Lamongan (Nybakken & Perron, 1988).

## **Hasil Penelitian**

### **Karakteristik Sosial Informan**

Informan dalam penelitian ini merupakan individu yang tinggal di kawasan pesisir Lamongan dan memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan laut. Sebagian besar informan berjenis kelamin laki-laki. Hal ini mencerminkan keterlibatan dominan laki-laki dalam aktivitas pesisir seperti melaut, memperbaiki perahu, atau memanfaatkan sumber daya laut lainnya. Sebaliknya, perempuan cenderung berperan dalam pengolahan hasil laut dan kegiatan domestik, yang meskipun penting, tidak selalu mempertemukan mereka secara langsung dengan ekosistem lamun.

Dari segi usia, sebagian besar informan berada dalam kelompok usia produktif. Mereka aktif secara sosial dan ekonomi, serta memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarga lain, baik anak-anak maupun orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap ekosistem pesisir kemungkinan besar dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan keberlanjutan sumber daya laut. Tingkat pendidikan informan cukup beragam, namun didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas. Pendidikan ini menjadi modal penting bagi daya tangkap informasi terkait pelestarian lingkungan, meskipun sebagian informan mengaku belum pernah memperoleh pengetahuan khusus tentang lamun.

Sebagian besar informan bekerja sebagai nelayan, petani tambak, atau pedagang hasil laut. Mata pencaharian ini sangat terkait langsung dengan kondisi ekosistem pesisir, termasuk lamun. Informan dari kelompok ini memiliki pengalaman empiris yang panjang dan pengetahuan lokal yang mendalam, meski belum semuanya memahami secara ilmiah fungsi lamun. Dari sisi status sosial, hampir seluruh informan merupakan warga biasa. Mereka lebih sering terlibat dalam praktik-praktik tradisional dan memiliki kedekatan dengan ruang hidup pesisir, menjadikan mereka sumber informasi utama tentang interaksi masyarakat dengan lamun.

### **Persepsi Terhadap Ekosistem Lamun**

Sebagian besar informan mengaku mengenal lamun dari pengalaman langsung di laut, meskipun hanya sedikit yang mengetahui istilah ilmiahnya. Salah satu nelayan menyatakan:

“Tumbuhannya seperti rumput tapi di dalam laut, biasanya banyak di tempat yang berpasir... biasanya banyak kerang-kerang, udang kecil-kecil dan ada juga ikannya.”

Hal ini menunjukkan bahwa meski secara visual informan mengenali lamun, kesadaran akan fungsi ekologis dan istilah teknisnya masih minim. Ketika ditunjukkan foto dan sampel lamun, sebagian besar informan baru menyadari bahwa tumbuhan tersebut berbeda dengan rumput laut. Ibu rumah tangga bernama Bu Sugiarti menyampaikan pengalamannya saat kecil:

“Lamun tipis Bu, berwarna hijau, mirip rumput di lapangan bola... dulu sering saya buat mainan jual-jualan dengan teman-teman.”

Sebagian besar informan memahami bahwa lamun berfungsi sebagai tempat hidup ikan dan biota laut kecil, namun belum memahami peranannya dalam menjaga stabilitas pesisir, menyerap karbon, atau meminimalisir abrasi. Beberapa informan bahkan meragukan kemampuan lamun menyerap logam berat, karena tidak pernah

mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan antara pengalaman lokal dan sains ekologi modern.

Informasi yang diterima informan tentang lamun sebagian besar berasal dari pengalaman turun-temurun atau pengamatan langsung. Hampir tidak ada informan yang menyebutkan pernah mendapatkan informasi melalui penyuluhan pemerintah atau kampanye konservasi. Bahkan, hampir seluruh informan menyatakan belum pernah mendengar adanya aturan atau kesepakatan lokal yang mendorong pelestarian lamun. Hal ini memperlihatkan lemahnya intervensi kelembagaan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lamun secara terstruktur.

### **Partisipasi dan Nilai Ekologis**

Ketika ditanya tentang kemauan untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lamun, sebagian besar informan menyatakan kesediaan mereka. Beberapa menyebut alasan religius sebagai motivasi, seperti dikemukakan oleh Pak Amin, nelayan berusia 36 tahun:

“Saya mau Bu ikut kalau ada kegiatan yang menjaga laut, anak cucu saya butuh laut, butuh makan dari laut Bu.”

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran ekologis yang tumbuh dari nilai moral dan tanggung jawab antargenerasi. Namun, ada juga informan yang menyatakan ketidaktertarikan untuk terlibat karena menganggap konservasi tidak memberikan manfaat langsung atau bahkan dianggap membuang waktu.

Informan juga menunjukkan variasi dalam persepsi mereka terhadap manfaat lamun. Sebagian melihat lamun sebagai sumber kehidupan karena menjadi tempat ikan berkembang biak, dan memberikan keuntungan ekonomi secara tidak langsung. Namun, informasi tentang jasa ekosistem lamun seperti penahan abrasi dan penyerap polutan masih sangat minim. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam

konservasi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka miliki dan relevansi langsung terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lamun sangat tergantung pada penguatan literasi ekologis, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, dan keterlibatan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan konservasi. Pendekatan manajerial yang berbasis komunitas perlu disusun secara partisipatif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

## **Pembahasan**

### **1. Kerangka Teoretik Manajerial Berbasis Ekosistem**

Pengelolaan ekosistem lamun tidak bisa dilepaskan dari paradigma baru dalam tata kelola lingkungan, yaitu *adaptive governance* dan *resilience thinking*. Konsep ini menekankan bahwa ekosistem pesisir seperti lamun merupakan sistem sosial-ekologis yang kompleks, adaptif, dan saling berinteraksi antara dimensi alam dan manusia (Folke et al., 2005). Oleh karena itu, tata kelola sumber daya tidak cukup didekati dengan cara konvensional yang bersifat linear dan sektoral, tetapi harus berbasis pada prinsip sistemik, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika lokal.

Dalam konteks *adaptive governance*, pengelolaan ekosistem lamun sebaiknya dilakukan melalui proses yang terbuka, fleksibel, dan mampu belajar dari pengalaman (*learning-by-doing*). Hal ini memerlukan kapasitas kelembagaan lokal yang dapat merespons perubahan ekologi maupun sosial secara cepat dan inklusif (Chaffin et al., 2014). Informasi yang diperoleh dari masyarakat melalui persepsi lokal menjadi elemen penting dalam sistem pembelajaran adaptif, di mana pengetahuan lokal (*local ecological knowledge*) dapat digunakan bersama informasi ilmiah dalam pengambilan keputusan yang lebih adil dan kontekstual (Berkes, 2004).

Sementara itu, *resilience thinking* menekankan perlunya memperkuat daya lenting (resiliensi) masyarakat dan ekosistem terhadap tekanan, gangguan, atau krisis

yang mungkin timbul—baik akibat perubahan iklim, industrialisasi pesisir, maupun degradasi ekologis. Dalam konteks Lamongan, resiliensi sosial-ekologis ekosistem lamun sangat rendah karena tidak adanya instrumen kebijakan, kelembagaan, maupun pengetahuan masyarakat yang cukup untuk menjaga fungsi ekologis lamun. Untuk itu, strategi pengelolaan perlu dirancang guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespon gangguan, sembari menjaga keberlanjutan fungsi lamun sebagai penyedia jasa lingkungan (Biggs et al., 2015).

Penerapan kedua pendekatan *adaptive governance* dan *resilience thinking* secara sinergis memungkinkan munculnya tata kelola berbasis ekosistem (*ecosystem-based management*) yang menempatkan masyarakat lokal sebagai agen perubahan utama, bukan sebagai penerima pasif dari kebijakan eksternal.

## **2. Hambatan Implementasi Konservasi Lamun di Tingkat Lokal: Perspektif Kelembagaan dan Sosial-Politik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservasi lamun di pesisir Lamongan dihadapkan pada berbagai hambatan kelembagaan dan sosial-politik yang kompleks. Pertama, secara kelembagaan tidak ditemukan kerangka kebijakan lokal seperti Peraturan Desa atau dokumen perencanaan wilayah yang secara eksplisit memasukkan ekosistem lamun sebagai objek konservasi. Ketidakhadiran kerangka legal ini menyebabkan lemahnya arah perencanaan dan ketidakjelasan tanggung jawab antar sektor. Hal ini konsisten dengan temuan Gutiérrez yang menekankan bahwa kegagalan pengelolaan sumber daya laut sering kali berkaitan dengan kelembagaan yang lemah dan tidak responsif terhadap dinamika lokal (Gutiérrez et al., 2011).

Kedua, hubungan antar pemangku kepentingan di pesisir masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. Antara masyarakat, pemerintah desa, dinas kelautan,

hingga sektor swasta tidak memiliki ruang dialog bersama yang rutin dan efektif. Kurangnya koordinasi ini menghambat integrasi informasi serta mengurangi rasa memiliki terhadap program konservasi. Proyek konservasi yang bersifat temporer dan tidak berbasis partisipasi hanya memperburuk kondisi ini, karena masyarakat merasa dipinggirkan dalam pengambilan Keputusan (Agrawal & Gibson, 1999).

Ketiga, secara sosial-politik, terdapat ketimpangan informasi dan akses antara kelompok masyarakat. Masyarakat yang memiliki posisi lebih tinggi secara sosial seperti tokoh masyarakat, elite lokal, atau pejabat desa cenderung lebih mendapat akses terhadap program pemerintah, sedangkan kelompok nelayan dan ibu rumah tangga yang menjadi aktor utama dalam interaksi sehari-hari dengan lamun sering kali tidak dilibatkan secara penuh. Kesenjangan ini menciptakan *asymmetrical participation*, di mana keputusan dibuat tanpa melibatkan pengetahuan dan kebutuhan nyata warga pesisir (Cooke & Kothari, 2001).

Keempat, hambatan lain muncul dari kurangnya kapasitas teknis dan pendanaan untuk melakukan konservasi secara mandiri. Program konservasi seringkali bergantung pada proyek-proyek donor atau bantuan pemerintah, sehingga keberlanjutannya tidak terjamin. Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan lokal dan pengalokasian dana desa untuk konservasi berbasis masyarakat menjadi sangat penting. keberhasilan konservasi lamun memerlukan perubahan struktur tata kelola dari yang bersifat birokratis ke arah yang lebih kolaboratif, deliberatif, dan berbasis pada dinamika komunitas. Peran pihak ketiga seperti LSM, perguruan tinggi, dan tokoh agama menjadi penting sebagai *broker* untuk menjembatani diskursus antara masyarakat dan negara.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkap bahwa persepsi masyarakat pesisir Lamongan terhadap ekosistem lamun masih terbatas, baik dari aspek ekologis maupun

ekonomis. Sebagian besar informan mengenali lamun hanya sebagai tumbuhan laut yang mirip rumput, tanpa memahami secara menyeluruh manfaatnya sebagai penyedia jasa ekosistem penting. Meskipun lamun memiliki peran vital dalam menjaga kestabilan pesisir, menyerap karbon, dan menyediakan habitat bagi biota laut, pemahaman ini belum menjadi bagian dari kesadaran masyarakat secara luas. Temuan lapangan menunjukkan bahwa informasi mengenai ekosistem lamun sebagian besar diperoleh melalui pengalaman langsung, bukan melalui pendidikan atau penyuluhan lingkungan. Hal ini mengindikasikan lemahnya literasi ekologis masyarakat dan belum optimalnya peran lembaga pemerintah atau non-pemerintah dalam menyediakan edukasi lingkungan yang memadai.

Sebagian besar informan memiliki latar belakang pendidikan menengah dan bekerja sebagai nelayan atau pelaku ekonomi pesisir lainnya. Nilai agama juga muncul sebagai pendorong utama kesediaan mereka dalam menjaga lingkungan, meskipun tidak dibarengi dengan pengetahuan teknis atau pemahaman kebijakan. Dalam konteks ini, pendekatan manajerial berbasis ekosistem yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat menjadi sangat relevan. Minimnya aturan lokal seperti peraturan desa serta ketiadaan forum kolaboratif antar pemangku kepentingan menjadi hambatan nyata dalam konservasi lamun yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu strategi penguatan kelembagaan di tingkat desa untuk membentuk norma sosial baru dan struktur tata kelola partisipatif.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penting untuk mengembangkan program edukasi lingkungan yang bersifat lokal dan kontekstual, menggunakan pendekatan visual serta bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Kedua, pemerintah desa dapat mendorong penyusunan peraturan desa yang melindungi ekosistem lamun, termasuk zonasi pemanfaatan dan pengawasan

partisipatif. Ketiga, pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam komunikasi konservasi perlu diperkuat, mengingat peran mereka sangat besar dalam membentuk nilai sosial komunitas. Terakhir, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam forum pengelolaan pesisir terpadu, agar pengelolaan lamun dapat dilaksanakan secara adil, adaptif, dan berkelanjutan.

## **Referensi**

- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629–649.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Berkes, F. (2004). Rethinking community-based conservation. *Conservation Biology*, 18(3), 621–630.
- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). A decade of adaptive governance scholarship: synthesis and future directions. *Ecology and Society*, 19(3).
- Cooke, B., & Kothari, U. (2001). *Participation: The new tyranny?* Zed books.
- Cullen-Unsworth, L. C., Nordlund, L. M., Paddock, J., Baker, S., McKenzie, L. J., & Unsworth, R. K. F. (2014). Seagrass meadows globally as a coupled social–ecological system: Implications for human wellbeing. *Marine Pollution Bulletin*, 83(2), 387–397.
- Den Hartog, C. (1970). *The sea-grasses of the world*. North-Holland, Amsterdam.
- Fanning, L. M., Al-Naimi, M. N., Range, P., Ali, A.-S. M., Bouwmeester, J., Al-Jamali, F., Burt, J. A., & Ben-Hamadou, R. (2021). Applying the ecosystem services-EBM

- framework to sustainably manage Qatar's coral reefs and seagrass beds. *Ocean & Coastal Management*, 205, 105566.
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annu. Rev. Environ. Resour.*, 30(1), 441–473.
- Gutiérrez, N. L., Hilborn, R., & Defeo, O. (2011). Leadership, social capital and incentives promote successful fisheries. *Nature*, 470(7334), 386–389.
- Julianinda, Y. A., Dewi, C. S. U., Kasitowati, R. D., & Kurniawan, F. (2022). Studi Pustaka: Distribusi dan Sebaran Lamun di Jawa Timur. *JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)*, 6(1), 120–129.
- Karuntu, M. M., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Pendekatan Grounded Teori: Sebuah Kajian Prinsip, Prosedur, Dan Metodologi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2).
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92–101.
- Lukman, K. M., Uchiyama, Y., Quevedo, J. M. D., & Kohsaka, R. (2021). Local awareness as an instrument for management and conservation of seagrass ecosystem: Case of Berau Regency, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 203, 105451.
- Mendoza-Gonzalez, G., Paredes-Chi, A., Mendez-Funes, D., Giraldo, M., Torres-Irineo, E., Arancibia, E., & Rioja-Nieto, R. (2021). Perceptions and social values regarding the ecosystem services of beaches and coastal dunes in Yucatan, Mexico. *Sustainability*, 13(7), 3592.
- Mtwana Nordlund, L., Koch, E. W., Barbier, E. B., & Creed, J. C. (2016). Seagrass ecosystem services and their variability across genera and geographical regions. *Plos One*, 11(10), e0163091.

- Nybakken, J., & Perron, F. (1988). Ontogenetic change in the radula of *Conus magus* (Gastropoda). *Marine Biology*, 98(2), 239–242.
- Rifai, H., Quevedo, J. M. D., Lukman, K. M., Hernawan, U. E., Alifatri, L., Risandi, J., Kuswadi, Kristiawan, Uchiyama, Y., & Kohsaka, R. (2023). Understanding community awareness of seagrass ecosystem services for their blue carbon conservation in marine protected areas: A case study of Karimunjawa National Park. *Ecological Research*, 38(4), 541–556.
- Ruiz-Frau, A., Hinz, H., Edwards-Jones, G., & Kaiser, M. J. (2013). Spatially explicit economic assessment of cultural ecosystem services: Non-extractive recreational uses of the coastal environment related to marine biodiversity. *Marine Policy*, 38, 90–98.
- Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. *Bandung: Alfabeta*, 288.
- Ulum, M. C., & Anggaini, N. L. V. (2020). *Community empowerment: teori dan praktik pemberdayaan komunitas*. Universitas Brawijaya Press.
- Utami, N., Saragih, R. F., Daulay, M., Maulana, M. D., & Ramadani, P. (2023). Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi Indonesia. *Journal of Management and Social Sciences*, 2(1), 46–59.
- Waycott, M., Duarte, C. M., Carruthers, T. J. B., Orth, R. J., Dennison, W. C., Olyarnik, S., Calladine, A., Fourqurean, J. W., Heck Jr, K. L., & Hughes, A. R. (2009). Accelerating loss of seagrasses across the globe threatens coastal ecosystems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(30), 12377–12381.